

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Akhir Oktober 2008, para geolog dari berbagai negara mengadakan konferensi internasional membahas penyebab semburan lumpur di Sidoarjo sebagai salah satu topik khusus dari puluhan topik yang menjadi bahasan konferensi itu. Pertemuan ini merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh para geolog dunia untuk membahas topik-topik yang berkaitan dengan bidang keilmuan mereka. Tahun sebelumnya masalah yang sama juga telah menjadi pembahasan dalam konferensi serupa, dan pandangan yang dominan melihat masalah semburan lumpur di Sidoarjo sebagai bencana alam. Tahun 2008 berlangsung dua pertemuan geolog tingkat dunia. Yang pertama diadakan di London dan berlangsung secara tertutup dihadiri oleh 74 ilmuwan tanpa kesimpulan –masing-masing ilmuwan tetap pada pendapatnya. Pertemuan kedua diadakan di Cap Town, Afrika Selatan oleh American Association of Petroleum Geology (AAPG) berlangsung secara terbuka dihadiri oleh 1008 orang, dan hasilnya disimpulkan melalui mekanisme pemungutan suara. Hanya 74 orang yang memiliki hak suara dalam konferensi itu. Lebih dari lima puluh persen, yakni 42 orang memandang bahwa menyemburnya lumpur di Sidoarjo disebabkan oleh pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo, 3 suara setuju gempa, 13 peserta setuju kombinasi keduanya, dan 16 peserta menganggap diskusi belum tuntas.

Beberapa media nasional kembali mengangkat topik lumpur di Porong terutama berkaitan dengan hasil konferensi tersebut. Meski hampir semua media massa nasional mengangkat topik dengan *angle* yang sama, namun dengan judul, *lead* berita, dan cara penyampaian yang berbeda menggambarkan berpihak pada pandangan yang mana media tersebut. Sebagian besar media membuat judul dan *lead* berita tentang kesimpulan akhir konferensi itu, sementara yang lain memberikan gambaran tentang proses pada judul dan *lead* berita sebelum

membahas kesimpulan akhir konferensi itu.<sup>1</sup> Apa yang disampaikan media massa memberikan pesan dan kesan pada publik atas realitas yang dipotretnya. Media yang menitikberatkan pada hasil konferensi, seperti Kompas dan Jakarta Post, memberikan citra pada publik bahwa bencana lumpur di Porong disebabkan oleh kesalahan pengeboran, sedangkan media yang menitikberatkan pada proses, seperti Majalah Tempo, memberikan kesempatan pada publik menimbang proses terlebih dahulu untuk menilai sendiri hasil akhir konferensi.

Media dan ilmuwan adalah agen yang memproduksi pengetahuan yang dapat mempengaruhi bagaimana publik mempersepsikan realitas. Berita di media massa memberikan gambaran bagaimana klaim kebenaran tengah diperebutkan terhadap kasus bencana lumpur di Porong. Setiap produksi pengetahuan berimplikasi terhadap pembentukan realitas dan tatanan sosial yang dibayangkan oleh produsennya. Kasus bencana lumpur di Porong merupakan gambaran nyata atas efek besar dari sebuah proses produksi pengetahuan. Keyakinan dari pengetahuan tertentu sebagai kebenaran berimplikasi terhadap penanganan dan penyelesaian dampak sosial dan lingkungan dari semburan lumpur panas di Porong.<sup>2</sup>

Tesis ini berusaha mengeksplorasi bagaimana klaim kebenaran dalam memandang kasus semburan lumpur di Porong diperebutkan oleh aktor-aktor dalam kasus lumpur Lapindo. Perdebatan para ilmuwan dalam memandang asal semburan itu menunjukkan bahwa produksi pengetahuan yang ilmiah sekalipun merupakan bentuk konstruksi ilmuwan terhadap alam atau terhadap fenomena

---

<sup>1</sup> Lihat contoh pada berita Kompas (31/10/2008) dengan judul “Geolog Dunia Yakin Lumpur Tak Dipicu Gempa” dan Jakarta Post (31/10/2008) dengan judul “Geologists Blame Gas Drilling for Indonesia Mud Disaster” merupakan berita yang *lead* dan judulnya menggambarkan bahwa konferensi geolog internasional menyimpulkan Lapindo sebagai penyebab semburan lumpur dan kesimpulan ini menjadi referensi yang *legitimate* dalam memandang sebab semburan. Majalah Tempo (2-8/11/2008) memberi judul “Voting Lapindo di Negeri Orang” dengan *lead* berita yang membahas proses voting daripada kemenangan hasil voting merupakan contoh berita yang lebih mempersoalkan proses daripada mencari legitimasi pandangan dalam melihat kasus Lapindo.

<sup>2</sup> Model penyelesaian yang telah berlangsung selama dua tahun, yakni yang mengacu pada Perpres no. 14 tahun 2007, didasarkan atas pandangan bahwa Lapindo sebagai penyebab terjadinya bencana lumpur tersebut. Sebagian besar penyelesaian ganti rugi korban dibebankan pada perusahaan pertambangan ini. Sementara jika pemerintah berpegang pada keyakinan sebaliknya, skema penyelesaian atas dampak sosial akan menjadi berbeda. Beban penyelesaian ganti rugi warga akan ditanggung oleh APBN jika kasus ini dikategorikan sebagai bencana alam. Namun, soal ini tidak menjadi alasan utama dalam konteks bahwa sebagian besar publik meyakini kasus ini sebagai kesalahan Lapindo.

semburan. Tidak ada kebenaran mutlak dalam ilmu pengetahuan, tetapi yang ada adalah konsensus epistemologis dari para ilmuwan dalam memandang sebuah fenomena. Voting yang berlangsung pada pertemuan geolog di Cape Town secara jelas juga menunjukkan bahwa para ilmuwan berupaya mengkonstruksi pengetahuan tentang semburan lumpur. Tesis ini tidak berupaya menemukan kebenaran atau mencari pandangan ilmiah yang paling benar dalam memandang kasus semburan lumpur. Tesis ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana cara pandang tertentu terbentuk atau bagaimana orang dapat memandang semburan lumpur di Porong sebagai bencana alam, sementara yang lain memandang secara berbeda.

Para aktor dalam kasus ini saling memperebutkan klaim kebenaran dengan mengkonstruksi wacana dan pengetahuan yang sah tentang sebab semburan. Namun, persoalannya bukan sekedar terdapat perebutan klaim kebenaran atau terdapat pertarungan wacana dalam memandang semburan, tetapi bahwa kemenangan wacana yang menjadi sebuah rezim kebenaran memiliki implikasi yang besar atas konstruksi tentang realitas dan tatanan sosial yang dibayangkan.<sup>3</sup> Persoalan ini juga menjadi pokok perhatian dalam tesis ini, yakni bagaimana aktor-aktor tertentu memanfaatkan konstruksi pengetahuan tentang semburan sebagai dasar bagaimana skema penyelesaian kasus ini seharusnya. Proses di mana pengetahuan tentang semburan dan skema penyelesaian kasus ini dikonstruksi menggambarkan bagaimana aktor-aktor menjalankan kekuasaan.

Merujuk pada Foucault, wacana berkaitan dengan produksi pengetahuan yang tidak lepas dari bagaimana kekuasaan dijalankan. Analisis wacana menjadi penting untuk memahami produksi pengetahuan, kekuasaan, dan politik dan karena itu kekuasaan bisa dijalankan secara koersif maupun produktif yang membedakan antara wacana yang dominan dengan yang minoritas.<sup>4</sup> Produksi wacana menjadi dominan melibatkan aktor-aktor yang mengorganisasikan pengetahuan secara sistematis sehingga menjadi otoritatif dan *legitimate* dalam

---

<sup>3</sup> Realitas dan tatanan sosial yang dimaksud dalam konteks ini berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi korban dan pemulihan kondisi lingkungan dan sosial akibat dampak semburan lumpur di Porong.

<sup>4</sup> Doolittle, Amity A. 2005. *Property and Politics in Sabah, Malaysia: Native Struggles over Land Rights*. University of Washington Press. Seattle and London. Hlm. 6.

menerangkan sesuatu. Tesis ini menganalisa bagaimana proses inkulkasi organisasi pengetahuan itu sehingga diterima sebagai kebenaran dalam menerangkan realitas. Wacana menjadi dominan ketika ia bisa mempengaruhi publik, terutama subjek yang berkaitan dengan produksi pengetahuan itu, yang diterima sebagai penjelasan tentang realitas yang tidak perlu dipersoalkan lagi.

Pada kasus Lapindo, terdapat dua wacana dominan yang berkontestasi dalam ruang publik yang mempengaruhi bagaimana kasus ini dilihat dan diselesaikan. Lapindo melalui geolog dan media massa merupakan aktor yang memproduksi pengetahuan yang memandang bahwa kasus ini belum tentu diakibatkan oleh kesalahan Lapindo. Subjek yang menjadi target kontrol sosial melalui pembentukan rezim kebenaran tentang 'belum pastinya Lapindo bersalah' adalah kelompok korban dari GKLL (Gabungan Korban Lumpur Lapindo). Pandangan ini berimplikasi terhadap model penyelesaian ganti rugi di mana korban dapat selalu menyesuaikan kehendak dan kesanggupan korporasi dalam pemenuhan ganti rugi, meski skema seperti ini dihasilkan melalui negosiasi.

Wacana dominan yang lain adalah pengetahuan yang diorganisasikan dan diproduksi oleh para aktivis yang meyakini semburan lumpur berkaitan dengan proyek eksplorasi Lapindo. Para aktivis juga bekerja sama dengan geolog dan media massa dalam mengkonstruksi pandangan ini agar menjadi *legitimate* dalam menerangkan sebab semburan. Subjek yang dikendalikan adalah korban yang belum tuntas proses penyelesaian ganti ruginya dengan tuntutan yang sulit untuk bisa dipenuhi oleh Lapindo. Lapindo bersikukuh bahwa tanah non sertifikat tidak bisa diselesaikan melalui pemberian ganti rugi tunai, melainkan melalui tukar guling tanah, sedangkan korban dengan berpegang pada risalah menteri-menteri terkait, berpandangan bahwa hal itu tidak menjadi soal untuk bisa diganti secara tunai. Para aktivis lebih mendukung korban yang memiliki sikap demikian daripada sebaliknya dengan memandang bahwa ketidaksanggupan Lapindo memenuhinya tidak lain sebagai dalih mengurangi beban tanggung jawab atau mencari peluang keuntungan dalam penyelesaian kasus ini.

Relasi antara pembentukan rezim kebenaran dengan bagaimana kekuasaan dijalankan dapat dilihat melalui bagaimana aktor-aktor dominan dalam

pembentukan wacana mengkonstruksi realitas yang dibayangkannya. Saya merujuk konsep normalisasi Foucault dalam menggambarkan model relasi kekuasaan yang dijalankan dalam mengkonstruksi praktik sosial korban dan tatanan sosial yang hendak diwujudkan. Dalam kajian antropologi pembangunan,<sup>5</sup> ide *developmentalism* merupakan gambaran mengenai bagaimana tatanan sosial seharusnya dikonstruksi. Agen-agen pembangunan membentuk narasi tentang bagaimana tatanan sosial yang normal yang dapat menuju pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, sebagai ide pokok pembangunan. Mereka terlebih dahulu membuat definisi tentang situasi abnormalitas seperti kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, pemerintahan yang koruptif sehingga agenda pembangunan menjadi relevan. Kata kuncinya adalah pada problematisasi.

Problematisasi selalu mengandung kehendak mengkonstruksi realitas dalam ruang definisi normalitas. Pada kasus Lapindo, definisi normalitas bukan soal pembangunan melainkan konstruksi tentang *recovery* lingkungan hidup dan lingkungan sosial akibat dampak semburan. Kedua aktor dominan dalam kasus ini masing-masing memiliki definisi abnormalitas tatanan sosial dan lingkungan akibat semburan. Para aktivis memproblematisasikan akibat semburan tidak hanya mencakup ganti rugi materiil seperti terdapat dalam Perpres, tetapi juga kerusakan lingkungan secara lebih luas yang berdampak pada pertanian, pertambangan, dan kesehatan masyarakat sekitar. Sementara tuntutan korban tidak lebih dari apa yang telah diatur dalam Perpres. Ketentuan ganti rugi Perpres menurut para aktivis merupakan model ganti rugi minimalis karena terbatas pada apa yang mereka sebut sebagai *very basic demand*. Kondisi itu mendorong para aktivis mewacanakan dan menarasikan pada korban mengenai kerugian yang lebih besar akibat persoalan yang lebih luas dari sekedar tenggelamnya pemukiman penduduk. Para aktivis menghendaki korban tidak hanya menuntut ganti rugi dalam kerangka skema Perpres tetapi juga menuntut pemulihan kondisi lingkungan dan sosial seperti yang diharapkan para aktivis.

---

<sup>5</sup> Pembangunan menjadi isu sentral dalam kajian politik ekologi di dunia ketiga. Lihat Bryant, Raymon L dan Sinead Bailey. 1997. *Third World Political Ecology*. Routledge. London.

Definisi abnormalitas Lapindo terbatas pada rumusan skema Perpres. Lapindo mendukung ilmuwan yang berpandangan bahwa lumpur Lapindo tidak mengandung kandungan zat yang berbahaya bagi lingkungan sehingga skema *recovery* sebatas pemberian ganti rugi yang diukur dari tenggelamnya pemukiman warga. Lapindo tidak berkehendak melakukan pemulihan lebih besar seperti yang dituntut para aktivis karena juga berpegang pada pandangan bahwa semburan lumpur belum tentu berkorelasi dengan aktivitas pengeboran.

Cara-cara yang digunakan oleh aktor-aktor dominan<sup>6</sup> dalam mengkonstruksi praktik sosial korban yang berkaitan dengan penyelesaian kasus Lapindo menggambarkan teknologi kekuasaan yang dijalankan. Tidak hanya melalui pembentukan wacana yang *legitimate*, aktor-aktor dominan juga mengatur korban agar mengatur dirinya menjalankan praktik sosial yang tepat seperti yang dibayangkan dan dikehendaki oleh aktor dominan. Konsep governmentality Foucault menjelaskan tentang kekuasaan yang dijalankan dalam mengatur subjek dan benda (objek) pada posisi yang tepat sebagai *right disposition of things*.

Dengan menginspirasi teori kekuasaan Foucauldian, tesis ini mengeksplorasi pertarungan wacana dan perebutan klaim kebenaran dalam memandang sebab semburan lumpur dan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam mengkonstruksi realitas sebagai implikasi dari masing-masing klaim kebenaran itu. Wacana menjadi objek kajian dalam sosiologi lingkungan dalam konteks wacana tentang pemaknaan terhadap lingkungan (*environmental discourse*)<sup>7</sup>. Pada kasus yang menjadi kajian dalam tesis ini, klaim kebenaran yang dimaksud juga berhubungan dengan bagaimana para aktor-aktor memaknai dan memandang semburan lumpur, sebagai bencana alam atau akibat kesalahan manusia. Sosiologi lingkungan secara lebih luas mengkaji interaksi manusia dengan alam dan bertujuan untuk bisa memberikan sumbangan penting terhadap permasalahan lingkungan.<sup>8</sup> Namun demikian, interaksi manusia dengan alam sebenarnya tidak hanya melahirkan permasalahan lingkungan tetapi juga masalah sosial. Pada kasus

---

<sup>6</sup> Aktor dominan adalah aktor yang memproduksi, mengorganisasikan, dan mendeseminasikan wacana dominan yang mempengaruhi publik dalam memandang semburan.

<sup>7</sup> Hannigan, John. 2006. *Environmental Sociology; Second Edition*. Routledge. New York.

<sup>8</sup> Novriaty, Shanty. 2006. *Pemetaan Pemikiran dalam Sosiologi Lingkungan*. Jurnal Masyarakat. Vol XIII. No. 2. Lab Sosio UI. Jakarta.

Lapindo, masalah sosial mengemuka terutama akibat adanya persoalan lingkungan sebagai dampak semburan lumpur. Permasalahan lingkungan dalam tesis ini adalah terjadinya kerusakan ekosistem, dan pencemaran lingkungan, dan soal ini masih menjadi perdebatan para ilmuwan.

Teori kekuasaan menginspirasi saya tidak hanya menganalisa cara dan praktik yang dijalankan korporasi dan NGO tetapi juga menganalisa berbagai bentuk respon penduduk lokal (masyarakat dan korban) baik pandangan maupun reaksi sikap mereka terhadap Lapindo, NGO, dan pemerintah dalam penyelesaian kasus semburan lumpur. Interaksi korban dengan Lapindo, NGO, dan pemerintah menjadi pokok perhatian dalam penelitian saya yang menggambarkan cara bagaimana kekuasaan dijalankan oleh korban, tidak hanya melalui resistensi, tetapi juga negosiasi, kolaborasi, dan kompromi sebagai respon korban terhadap intervensi aktor-aktor lainnya yang mempengaruhi praktik sosial korban. Peran pemerintah memang tidak tergambar secara dominan karena pada kasus ini intervensi pemerintah terbatas pada produksi kebijakan hukum. Namun, justru dengan demikian, pada ranah relasi dominasi, pemerintah merupakan aktor dominan yang berkepentingan agar semua penyelesaian kasus semburan lumpur mengacu pada skema yang terdapat dalam Perpres.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Tesis ini disusun dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana klaim kebenaran diperebutkan oleh aktor-aktor dalam kasus Lapindo?
2. Bagaimana aktor-aktor dominan mengkonstruksi tata lingkungan dan sosial sebagai bentuk penyelesaian kasus Lapindo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan. Pertama, penelitian ini berusaha memperoleh gambaran mengenai posisi kasus yang dilihat dari relasi

aktor-aktor. Kedua, dengan melihat pada perdebatan para ilmuwan alam dalam memandang dan mengkonstruksi fenomena semburan lumpur di Porong sebagai persoalan yang mendasari keseluruhan proses penyelesaian, penelitian ini merupakan upaya untuk memperoleh gambaran bagaimana pertarungan wacana dan perebutan klaim kebenaran dalam memandang kasus semburan lumpur diperebutkan oleh aktor-aktor. Ketiga, implikasi kemenangan wacana sebagai acuan dalam memandang semburan terhadap model skema penyelesaian kasus membawa saya pada penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana proses inkulsi sebuah pandangan diyakini sebagai kebenaran dan bagaimana masing-masing aktor mengkonstruksi pengetahuan tentang semburan lumpur. Keempat, bentuk penyelesaian kasus yang bergantung pada asumsi yang digunakan dalam melihat semburan lumpur, membawa penelitian ini dalam upaya untuk memahami bagaimana aktor-aktor dominan mengkonstruksi tata lingkungan dan sosial akibat semburan lumpur. Kelima, dengan mengelaborasi teori kekuasaan Foucault, tesis ini bertujuan memberikan analisa bagaimana teknologi kekuasaan yang dijalankan oleh aktor-aktor dalam mengkonstruksi penyelesaian kasus Lapindo.

#### **1.4. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi teoritis dari penelitian ini yang berusaha melihat hubungan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan dijalankan oleh aktor-aktor dalam mengkonstruksi tata lingkungan dan sosial akibat semburan lumpur di Sidoarjo dengan menggunakan wacana dan klaim kebenaran sebagai rujukan pandangan yang dianggap paling sah dalam mempersoalkan fenomena semburan dan dampak sosialnya, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana model relasi kekuasaan dalam konteks kasus Lapindo. Penelitian ini menginspirasi teori kekuasaan Foucauldian dan karenanya penelitian ini tidak menguji teori. Teori kekuasaan Foucault menjadi inspirasi peneliti dalam melakukan pengumpulan data, merefleksikannya, dan mengkerangkakannya dalam konsep-konsep. Dalam melakukan analisa, peneliti berdiskusi dengan konsep-konsep Foucault yang dengan demikian membuka peluang bagi lahirnya sintesa konseptual baru yang bertolak dari refleksi atas data lapangan.



Berpijak pada kajian-kajian sebelumnya tentang kasus semburan lumpur, penelitian ini memberikan gambaran dan analisa yang berbeda karena mengambil posisi untuk tidak terlibat dalam perdebatan para ilmuwan alam. Penelitian ini dilakukan tanpa pretensi bersandar pada salah satu pandangan dengan asumsi bahwa setiap pandangan baik yang diproduksi oleh ilmuwan maupun awam merupakan bentuk dari konstruksi mereka dalam memaknai fenomena semburan. Oleh karena itu, penelitian ini justru mempertanyakan asumsi-asumsi yang dibangun oleh aktor-aktor dalam memaknai fenomena semburan, dan menyelidiki bagaimana proses terbentuknya sebuah pandangan yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak perlu dipersoalkan lagi.

Penelitian ini bukan penelitian teori, dan jauh dari pilihan peneliti untuk mengkontekstualisasikan atau mengoperasionisasikan konsep Foucault dalam konteks kasus yang diteliti. Penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk memahami fenomena semburan lumpur dan implikasi sosialnya yang dinamik untuk memperoleh pemahaman yang kritis melalui analisa relasi aktor-aktor. Dengan demikian, secara praktis penelitian ini penting karena menghadirkan gambaran mengenai bagaimana aktor-aktor secara *taken for granted* mengkonstruksi pemaknaan tentang fenomena semburan dan dalam mengkonstruksi bagaimana skema penyelesaian atas kasus ini seharusnya, sehingga barangkali dapat menjadi bahan refleksi kritis aktor-aktor tersebut dalam penyelesaian kasus Lapindo.

## **1.5. Kerangka Konseptual**

### **1.5.1. Wacana dan Relasi Kekuasaan**

Teori kekuasaan Foucault menjadi inspirasi utama tesis saya dalam mengeksplorasi perdebatan wacana para ahli dan perebutan klaim kebenaran dalam memandang semburan lumpur Lapindo. Relasi kekuasaan menjadi perhatian penting dalam perspektif konstruksionisme sosiologi lingkungan dengan asumsi bahwa munculnya isu dan persoalan lingkungan merupakan hasil konstruksi sosial. Dalam penelitian ini, konsep kekuasaan yang digunakan merujuk pada perspektif Foucauldian. Bagi Foucault, kekuasaan tidak dipahami

dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber). Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau stuktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategik.

Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerfull* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok. Kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana (*omnipresent*), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal ini bukan karena kekuasaan itu memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidaktampakannya, melainkan karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Kekuasaan itu ada di mana-mana bukan karena ia merengkuh segala sesuatu melainkan karena ia datang dari manapun. Dalam *The History of Sexuality vol I*, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai bagaimana memandang kekuasaan, yakni (1990: 94-95): (1) Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. (2) Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai. (3) Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary opositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. (4) Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. (5) Di mana ada

kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Memilih konsep kekuasaan Foucault bukan semata-mata karena ia berbeda dengan konsep kekuasaan pada umumnya, terutama dari perspektif politik, melainkan karena konsep Foucault, dalam pandangan peneliti, memiliki perangkat yang cukup kompleks dalam memahami model-model relasi kekuasaan, terlebih karena konsepnya yang meliputi penjelasan tentang bentuk *micro power*, seperti telah diterangkan di atas.

Konsep Foucault tentang wacana dibahas dalam teorinya tentang relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Jauh sebelum Foucault berbicara secara eksplisit mengenai isu kekuasaan, fokus perhatian pada karya-karya awalnya adalah pada sejarah pengetahuan. Namun yang menjadi perhatiannya bukan penyelidikan mengenai suatu bentuk pengetahuan spesifik dalam sebuah disiplin ilmu dari waktu ke waktu, melainkan sejarah pengetahuan sebagai sebuah *episteme*, yakni suatu bentuk pengetahuan yang otoritatif pada suatu masa tertentu. Penyelidikan sejarah ini bertolak dari pertanyaan bagaimana suatu bentuk pengetahuan, yakni konsep-konsep atau pernyataan-pernyataan, terorganisasi secara tematis sehingga ia menjadi otoritatif dan *legitimate* dalam menerangkan segala sesuatu. Struktur pengetahuan yang otoritatif dan *legitimate* ini mempengaruhi praktik-praktik sosial individu. Dalam karya awalnya, *The Archaeology of Knowledge*, struktur pengetahuan ini disebut pula sebagai suatu formasi wacana.

Pengertian arkeologi pada karya tersebut tidak merujuk sebagai suatu metode penggalian sejarah antropologis yang mengandaikan bahwa sejarah (dalam hal ini adalah sejarah pengetahuan) berkembang secara linear. Suatu bentuk pengetahuan, dalam pandangan Foucault, dari masa ke masa bukan suatu perkembangan yang evolutif, melainkan sebagai pergeseran dari satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lain yang otoritatif pada masa tertentu sebagai sebuah rezim wacana. Arkeologi digunakan dalam studi sejarah untuk menangkap apa yang disebut oleh Foucault sebagai *episteme*. *Episteme*

merupakan bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu zaman tertentu. Ia dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada suatu zaman. Dalam studinya tentang kegilaan, misalnya, Foucault berusaha menangkap disposisi pengetahuan atas pemaknaan terhadap normalitas sebagai lawan dari abnormalitas atau kegilaan.

Pemantapan pengetahuan sehingga ia menjadi khas, melibatkan berlangsungnya operasi kekuasaan. Pemantapan itu berlangsung pada level wacana (*discourse*). Sebagai sebuah *episteme*, dalam hubungannya dengan pengetahuan ilmiah tidak lagi berdiri sebagai suatu cara pandang dalam melihat perbedaan dan pemisahan antara yang benar dari yang salah, melainkan pemisahan dalam ranah praktis antara yang mungkin dari yang tidak mungkin dilakukan. Melalui *episteme*, strategi beroperasinya kekuasaan dalam pengetahuan dapat diketahui. Foucault menggunakan arkeologi untuk menginvestigasi retakan-retakan zaman berdasarkan *episteme*, yakni mengetahui bagaimana terjadinya perubahan rezim pengetahuan dari suatu masa.

Secara implisit, Foucault mengatakan bahwa rezim wacana itu merupakan bentuk dari kekuasaan. Wacana dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, yang mengubah konstelasi sosial dan yang menghasilkan, dan wacana sebagai yang memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, dalam pandangan Foucault yang terinspirasi oleh Nietzsche, tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan benar yang final dan bersifat universal. Kebenaran tidak lain merupakan kasus-kasus khusus mengenai kekeliruan yang pada suatu masa tertentu diakui otoritatif dan *legitimate* belaka, seperti pada kasus Galileo, misalkan.

Klaim kebenaran itu merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan sebagai suatu wacana yang mempengaruhi institusi-institusi sosial dan praktik-praktik sosial. Itulah kenapa dalam pandangan Foucault kekuasaan tidak beroperasi secara negatif melalui aparatus yang koersif, menekan, dan menindas. Pada konteks ini kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Artinya, karena wujud kekuasaan itu tidak nampak, maka beroperasinya kekuasaan menjadi tidak

disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu. Kekuasaan dapat diketahui dan dirasakan melalui efek-efeknya. Bentuk pengetahuan atau rezim wacana yang otoritatif itu merupakan efek dari kekuasaan tersebut. Ia tidak bisa dipisahkan dari apparatus yang dapat mengendalikan apakah pengetahuan itu otoritatif atau tidak. Distingsi antara yang benar dan yang salah juga melibatkan apparatus ilmiah yang memproduksi pengetahuan melalui ritus-ritus kebenaran, yakni melalui dasar empiris sebagai legitimasi bagi kebenaran pengetahuan itu.

Definisi-definisi ilmiah secara jelas juga menunjukkan efek beroperasinya kekuasaan dalam bentuk rezim wacana. Definisi psikiatri tentang mental mengubah praktik penanganan orang gila. Definisi kedokteran tentang penyakit, menyebabkan isolasi, pengasingan, dan mengubah hubungan sosial. Konsep tentang kecantikan menghasilkan salon, diet, cara makan, fitness, pakaian, dan kursus-kursus. Agama menghasilkan penyeragaman, baik pakaian, bahasa, perilaku, juga menghasilkan diskriminasi. Pembagian kerja membuat diskriminasi terhadap seksualitas, efisiensi, dan tradisi. Rezim wacana yang bersandar pada definisi-definisi ilmiah itu menggambarkan disposisi suatu pengetahuan pada masa tertentu yang berimplikasi terhadap praktik sosial.

Hubungan antara fungsi pembentukan wacana sebagai rezim kebenaran dengan relasi kekuasaan dijelaskan oleh Foucault sebagai berikut:

*“Relation of power cannot themselves be established, consolidated, nor implemented without the production, accumulation, circulation, and functioning of a discourse. There can be no possible exercise of power without a certain economy of discourse of truth which operates through and on the basis of this association. We are subjected to the object of truth through power and we cannot exercise power except through the production of truth”.*<sup>9</sup>

Relasi kekuasaan yang bekerja memanfaatkan fungsi wacana sebagai rezim kebenaran, menggunakan apparatus disiplin dalam normalisasi praktik sosial subjek. Bentuk relasi dalam pendisiplinan tubuh individu ini merupakan relasi dominasi. Ada aktor dominan yang memproduksi wacana sebagai pengetahuan yang *legitimate* dalam menerangkan realitas dan diendapkan oleh individu yang

---

<sup>9</sup> Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. Phanteon Books. New York. Hlm. 93

ditundukkan agar bersikap seperti yang dikehendaki oleh aktor dominan itu. Tindakan individu yang demikian merupakan tindakan yang tepat dan disiplin. Kepentingan aktor dominan menjadi rasionalitas atas tubuh yang disiplin.

Praktik pendisiplinan dijalankan sebagai aparatus kekuasaan terhadap target tubuh individu. Selain itu, Foucault juga mengkonseptualisasikan kekuasaan yang dijalankan dengan targetnya pada tubuh sosial melalui aparatus *governmentality*. Jika dalam pendisiplinan berlangsung relasi dominasi, maka pada *governmentality* beroperasi relasi kekuasaan. Alasannya, target pada tubuh sosial tidak memungkinkan relasi dominasi dijalankan dalam mendisiplinkan tubuh sosial. Seperti halnya dalam praktik pendisiplinan, penggunaan aparatus *governmentality* dalam mengontrol tubuh sosial juga memanfaatkan fungsi wacana dan produksi pengetahuan. Namun, bentuk pengetahuannya bukan dihasilkan melalui definisi ilmiah dan klaim kebenaran, melainkan pengetahuan tentang politik-ekonomi karena yang diatur adalah populasi, bukan lagi individu.

Konsep tentang problematisasi atas realitas menjadi pintu masuk untuk menjalankan kekuasaan yang menggunakan aparatus *governmentality*. Problematisasi menghendaki produksi pengetahuan dalam definisi politik-ekonomi produsennya. Pada konteks ini, aktor dominan tidak lagi menggunakan klaim kebenaran dalam mendisiplinkan tubuh sosial, melainkan dengan menghadirkan pandangan bahwa realitas yang tengah dihadapi oleh masyarakat merupakan realitas yang bermasalah. Problematisasi realitas akan membuka peluang bagi aktor dominan untuk mengintervensi dalam mengkonstruksi realitas agar tidak lagi dipandang bermasalah. Populasi yang menjadi target dari beroperasinya kekuasaan ini akan memandang hal itu sebagai suatu cara yang tepat. Demikian pula, aktor dominan akan melihat bahwa praktik sosial dan cara pandang populasi yang demikian sebagai sesuatu yang tepat pula. Praktik sosial populasi yang demikian tersebut merupakan praktik yang disiplin dan tepat pada posisi yang diharapkan oleh aktor dominan. Konsep ini disebut Foucault sebagai *right disposition of things*.

Kedua konsep kekuasaan Foucault di atas, yakni *disciplinary power* dan *governmentality* menjadi inspirasi saya dalam menganalisa bagaimana kekuasaan

dijalankan oleh aktor-aktor dalam kasus semburan lumpur Lapindo. Kekuasaan dalam bentuk *sovereign power* hampir sulit dijalankan dalam konteks negara demokratis. Model kekuasaan ini mengandaikan pemilikan kekuasaan pada otoritas pusat dalam konsep negara yakni pada raja atau kepala negara.

Kasus Lapindo dapat memberikan gambaran bahwa kedua aparatus kekuasaan itu digunakan dalam mengkonstruksi realitas tentang bagaimana memulihkan kondisi lingkungan dan sosial akibat dampak semburan lumpur. Untuk mengetahui aparatus apa yang digunakan dalam mengontrol subjek korban memerlukan penyelidikan dan analisa terhadap praktik sosial korban. Target *governmentality* pada kasus ini bukan pada pengaturan korban tetapi realitas yang hendak dikonstruksikan. Demikian menurut Foucault apa yang menjadi target dari model kekuasaan ini;

*In Oedipus the King, frequently, or at several points, there is the metaphor of the king who is responsible for the city-state and must conduct it as a good pilot properly governs his ship, avoiding reefs and guiding it to port. But in these metaphors, which identify the king as a helmsman and the city as a ship, we should note that what is governed, what the metaphor designates as the object of government, is the city-state itself, which is like a ship threatened by reefs, a ship caught in the storm, a ship that has to steer a course avoiding pirates and enemies, and a ship that must be lead to safe harbor. Individuals are not the object of government; the action of government is not brought to bear on individuals. The captain or pilot of the ship does not govern the sailors; he governs the ship. In the same way, the king governs the city-state, but not the men of the city. The object or target of government is the city-state in its substantial reality, its unity, and its possible survival or disappearance. Men are only governed indirectly, insofar as they have boarded the ship. And men are governed through the intermediary or relay of boarding the ship. But it is not men themselves who are directly governed by the person who is the head of the city-state.<sup>10</sup>*

### **1.5.2. Relasi Dominasi dan Relasi Kekuasaan**

Ada perbedaan yang cukup mencolok atas pandangan mengenai kekuasaan terutama dari pandangan yang masih belum bisa melepaskan pengaruh perspektif Marxian atau Weberian tentang kekuasaan dengan pandangan Foucauldian. Beberapa akademisi yang mencoba memahami pandangan Foucault tentang kekuasaan pun rupanya tidak terlalu berhasil melepaskan diri dari kerangkeng

---

<sup>10</sup> Foucault. Security, Territory, Population; Lectures at The College de France. Palgrave. McMillan. 116

pengaruh perspektif kekuasaan negatif Marxian. Tania Li, misalnya, memandang *governmentality* sebagai sejenis dengan hegemoni (teknologi untuk mengontrol populasi tanpa menggunakan kekerasan dan dominasi tetapi dengan memanipulasi konsensus) namun minus potensi resistensi atau anti kekuasaan. Kita juga dapat melihat pada tulisan Amity Doolittle yang menggunakan konsep *governmentality* dalam menjelaskan relasi negara-masyarakat lokal dalam perebutan hak atas tanah sebagai cara negara mengontrol populasi dengan menciptakan mekanisme normalisasi dan pendisipinan, yang tentu saja bias dan tumpang tindih dengan konsep *disciplinary power*.<sup>11</sup> Demikian pula dapat kita lihat pada tulisan Peluso dan Watts dalam *Violent Environments* yang memandang bahwa *governmentality* sebagai konsep relasi kekuasaan dalam medan pertarungan negara vis a vis masyarakat.<sup>12</sup> Selanjutnya pengertian yang sama dapat kita lihat pada tulisan Paul Robbins dalam *Political Ecology* yang juga merujuk Bryant dalam memahami *governmentality* sebagai internalisasi cara-cara koersif yang dijalankan negara terhadap populasi dengan menciptakan *self-enforcing coercion* melalui pengendalian *consent*.<sup>13</sup>

Penulis-penulis di atas memberikan pengertian yang kurang lebih sama atas konsep *governmentality* sebagai penundukan yang dilakukan secara hegemonik sebagai mekanisme normalisasi relasi dominasi. Pemahaman demikian memiliki penertian yang tumpang tindih dengan konsep *disciplinary power* yang memiliki asumsi teoritik berbeda dengan konsep *governmentality*. Untuk menjawab tantangan konseptual ini, kita dapat melihat pada karya Foucault *Discipline and Punish* (1975) yang menekankan pada penyelidikan mengenai rasionalisasi politik yang dijalankan negara dan tentang genealogi negara (*genealogy of the state*) (1995: 139-141).<sup>14</sup> Di sisi lain, kita dapat melihat karya Foucault *History of Sexuality vol I* (1978) yang menekankan pada penyelidikan mengenai genealogi

---

<sup>11</sup> Dan anehnya Doolittle justru merujuk pada James Scott (*Weapon of the Weak*, 1985) dalam memahami konsep *power relation* Foucault, di mana Scott tidak menggunakan perspektif Foucauldian dalam memahami *everyday form of resistance* melainkan model *symbolic violence* Bourdieu dan *hegemony* Gramsci.

<sup>12</sup> Rujukan pemahaman Peluso dan Watts tentang konsep ini adalah pada karya Foucault yang berjudul *Discipline and Punish*. Hal ini wajar karena kepentingan teoritis kedua penulis itu adalah untuk menggambarkan relasi negara-masyarakat, sementara kepentingan Foucault dalam *Discipline and Punish* adalah melakukan genealogisasi negara (*genealogy of the state*).

<sup>13</sup> Lihat Robbins. 2004. *Political Ecology*. Blackwell Publishing. USA. Hlm. 150.

<sup>14</sup> Lihat juga Thomas Lemke (2001)



subjek (*genealogy of the subject*). Pada karya yang pertama Foucault berkepentingan menyelidiki bagaimana praktik kekuasaan yang dijalankan oleh negara menggunakan aparat disiplin, sementara pada karya selanjutnya Foucault berkepentingan menyelidiki bagaimana pembentukan subjek dalam relasi kekuasaan. Yang pertama adalah usaha untuk menunjukkan bagaimana bentuk kekuasaan, sementara yang belakangan menunjukkan bagaimana proses subjektifikasi terhadap individu dalam relasi sosial. Menurut Lemke (2001), *missing link* di antara dua penyelidikan itu terletak problem *government*. Konsep *governmentality* digunakan oleh Foucault untuk menganalisa hubungan antara apa yang dia sebut sebagai teknologi diri (*technology of the self*) dengan teknologi dominasi (*technology of domination*), dan pembentukan subjek (*constitution of the subject*) dengan formasi negara (*formation of the state*).<sup>15</sup>

Pandangan di atas dapat membantu untuk menjelaskan perbedaan antara relasi kekuasaan dengan relasi dominasi.<sup>16</sup> Dominasi adalah bentuk dari praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi di mana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas. Sebaliknya praktik *governmentality* adalah bentuk kontrol atau pengendalian diri (*self-government*) yang membentuk dan menghasilkan ranah kemungkinan pilihan tindakan subjek. Konsep kekuasaan ini tidak mengeksklusi bentuk konsensual (hegemoni) atau pilihan penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan dan model konsensual telah direformulasi menjadi elemen dalam pengendalian antarsubjek dalam relasi sosial. Metode-metode koersi dan konsensus itu merupakan elemen atau instrumen dari pada fondasi atau sumber relasi kekuasaan (Foucault, 1982b: 219-222). Menurut Lemke (2000: 4)<sup>17</sup> *governmentality* merupakan konsep kekuasaan yang digunakan oleh Foucault untuk mempelajari kapasitas otonom individu melakukan kontrol

---

<sup>15</sup> Ibid. Menurut Lemke, keterangan ini diperoleh dari materi kuliah Foucault pada 1978 dan 1979 di Colledge de France yang tidak dipublikasikan karena hanya tersedia dalam rekaman kaset.

<sup>16</sup> Hannigan dalam *Environmental Sociology, Second Edition*, secara tegas juga menjelaskan perbedaan konseptual dalam konsep kekuasaan Foucault dengan konsep dominasi Marxian. Dalam penjelasannya atas konsep kekuasaan Foucault, ia mengatakan bahwa “*power may be every where but relationship of power are rarely asymmetrical and wholly democratic. Foucault makes an important distinction between power and domination. The latter refers to asymmetrical relationships of power in which the subordinated party has a negligible chance of exercising his or her will. Wheres power relationships are often unstable and reversible, domination means that these relationships are less fluid and less negotiation*”. John Hannigan. 2006. *Environmental Sociology; Second Edition*. Routledge. New York. Hlm. 53.

<sup>17</sup> Lihat Thomas Lemke, *Foucault, Governmentality, and Critique*.

diri dan bagaimana hal itu berkaitan dengan politik dan eksploitasi ekonomi negara. *Governmentality* adalah konsep kekuasaan yang digunakan untuk menyelidiki bagaimana hubungan antara teknologi diri (*power from below*) dengan teknologi dominasi (*power from above*).<sup>18</sup>

*“I think that if one wants to analyze the genealogy of the subject in Western civilization, he has to take into account not only techniques of domination but also techniques of the self. Let’s say: he has to take into account the interaction between those two types of techniques – techniques of domination and techniques of the self. He has to take into account the points where the technologies of domination of individuals over one another have recourse to processes by which the individual acts upon himself. And conversely, he has to take into account the points where the techniques of the self are integrated into structures of coercion and domination. The contact point, where the individuals are driven by others is tied to the way they conduct themselves, is what we can call, I think government. Governing people, in the broad meaning of the word, governing people is not a way to force people to do what the governor wants; it is always a versatile equilibrium, with complementarity and conflicts between techniques which assure coercion and processes through which the self is constructed or modified by himself” (Foucault 1993, p. 203-4).*<sup>19</sup>

Merujuk pada pemahaman di atas, jika *governmentality* dipandang sebagai praktik kekuasaan yang potensial dalam diri subjek sehingga memiliki kapasitas kontrol diri maka cara-cara kekerasan dan konsensual pun berlangsung tetapi bukan dalam relasi dominasi, melainkan dalam relasi sosial antar individu. Dalam relasi kekuasaan (*governmentality*) juga menghadirkan situasi di mana individu berada dalam ranah pilihan tindakan. Individu tidak merasa dirinya terpaksa atau tidak ada pilihan tindakan yang lain selain apa yang sudah ditentukan oleh kelompok dominan, melainkan secara potensial dalam diri subjek terdapat pengendalian atas praktik hidupnya sesuai dengan kontrol sosial yang dikehendaki oleh kepentingan politik dan eksploitasi ekonomi negara.<sup>20</sup>

Relasi dominasi mengandaikan bahwa relasi antarsubjek tidak berlangsung secara sejajar atau seimbang. Relasi dominasi merupakan bentuk relasi kekuasaan yang asimetris di mana subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang

---

<sup>18</sup> Perbedaan antara *governmentality* dengan relasi dominasi sebagai *power from below* (*potentia*) dengan *power from above* (*potestas*) dapat dilihat pada tulisan Scott Lash (2007), *Power After Hegemony: Cultural Studies in Mutation?*; Couze Venn (2007), *Cultural Theory, Biopolitics, and the Question of Power*; atau Nicholas Thoburn (2007), *Pattern of Production: Cultural Studies after Hegemony*.

<sup>19</sup> Lihat op.cit

<sup>20</sup> Lihat Lemke.

untuk bermanuver atau menentukan pilihan suatu tindakan (Foucault, 1982a). Relasi dominasi adalah bentuk dari relasi kekuasaan yang stabil, hirarkis, fix, dan sulit untuk dipertahankan.

Perbedaan antara kekuasaan dengan dominasi dapat pula diketahui dengan melihat bahwa ada model relasi kekuasaan lainnya, yakni relasi kekuasaan sebagai *strategic games between liberties*. Beroperasinya kekuasaan dalam model ini dapat dilihat dalam bentuk manipulasi ideologi, penyampaian argumentasi yang rasional, atau eksploitasi ekonomi, tetapi ia tidak berarti bahwa kekuasaan ini dijalankan bertentangan dengan kepentingan subjek yang lain dari relasi kekuasaan itu; dan pada konteks ini juga tidak signifikan untuk mengatakan bahwa menentukan tindakan orang lain (*to determine the conduct of other*) adalah buruk. Relasi kekuasaan yang dijalankan dalam model ini dapat kita amati pada upaya-upaya melalui apa yang disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*) atau upaya pemaksaan terhadap subjek tertentu agar dapat menjadi subjek yang bebas dalam mengambil keputusan dalam berbagai ranah tindakan (Foucault, 1982a).

Model relasi kekuasaan lainnya adalah apa yang disebut oleh Foucault sebagai *governmentality*. Model relasi kekuasaan ini berada di antara *strategic games* dan dominasi. *Governmentality* hanya mungkin berlangsung di antara subjek yang memiliki kebebasan atau memiliki banyak kemungkinan pilihan tindakan. *Governmentality* disebut juga sebagai *conduct of conduct*, suatu relasi kekuasaan yang dibangun berdasarkan tindakan subjek yang mengarahkan orang lain atau cara bagaimana orang lain berperilaku dalam ranah kemungkinan pilihan tindakan yang sangat terbuka (Foucault, 1982b). Menjalankan relasi kekuasaan dalam model ini juga berarti sebagai mengatur, membentuk, dan mengkonstruksi ranah pilihan tindakan dari yang lain. Dengan demikian, ada tiga level analisa kekuasaan, yakni yang dipahami sebagai relasi strategi, *governmentality*, dan dominasi –yang biasanya disebut sebagai kekuasaan.

Sementara itu, Li dan beberapa penulis yang disebut di atas menyamakan *governmentality* dengan hegemoni atau dominasi yang dinormalisasikan melalui *consent*, bukan sebagai teknik dalam relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan itu

terdapat dalam setiap relasi sosial, karena itu kekuasaan tidak memusat dan tidak pula termiliki, tetapi ia tersebar: bukan karena merengkuh segalanya tetapi karena ia berasal dari manapun. Relasi dominasi mengandaikan bahwa subjek subordinat memiliki pilihan tindakan yang sangat terbatas, dan ia tidak memiliki pilihan lain selain yang dikehendaki kelompok dominan. Sedangkan relasi kekuasaan memberikan banyak kemungkinan pilihan tindakan. *Conduct of conduct* bukan bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi tindakan orang lain, melainkan adanya suatu tindakan tertentu dapat menghadirkan ranah pilihan tindakan yang sangat terbuka, tetapi ia sendiri memilih tindakan yang sebenarnya dikehendaki oleh negara.<sup>21</sup> Pemilihan tindakan itu bukan karena paksaan atau ketidaksadaran alam pikiran yang diarahkan oleh hegemoni dan menipulasi ideologi, melainkan secara potensial seorang individu menentukan pilihan tindakan yang sesungguhnya dikehendaki oleh negara. Dengan demikian, *governmentality* sesungguhnya adalah gambaran tentang mekanisme kekuasaan dalam relasi kekuasaan yang berada dalam setiap relasi sosial, bukan sekedar relasi negara dengan masyarakat seperti dalam pandangan Marx atau Gramsci. Hanya saja, memang relasi kekuasaan yang tampaknya hanya berurusan dengan relasi antar subjek ternyata semakin dipengaruhi oleh negara. Maka relasi kekuasaan yang berlangsung dalam setiap relasi sosial sesungguhnya *inheren* di dalamnya pengaruh kepentingan-kepentingan negara. Menurut Foucault, relasi kekuasaan kini sudah semakin dipengaruhi dan terus-menerus berada di bawah kontrol negara. Inilah mengapa kemudian Foucault menyebut model relasi kekuasaan itu dengan *governmentality*<sup>22</sup> karena memang relasi kekuasaan semakin digovermentalisasikan (*governmentalized*)<sup>23</sup>.

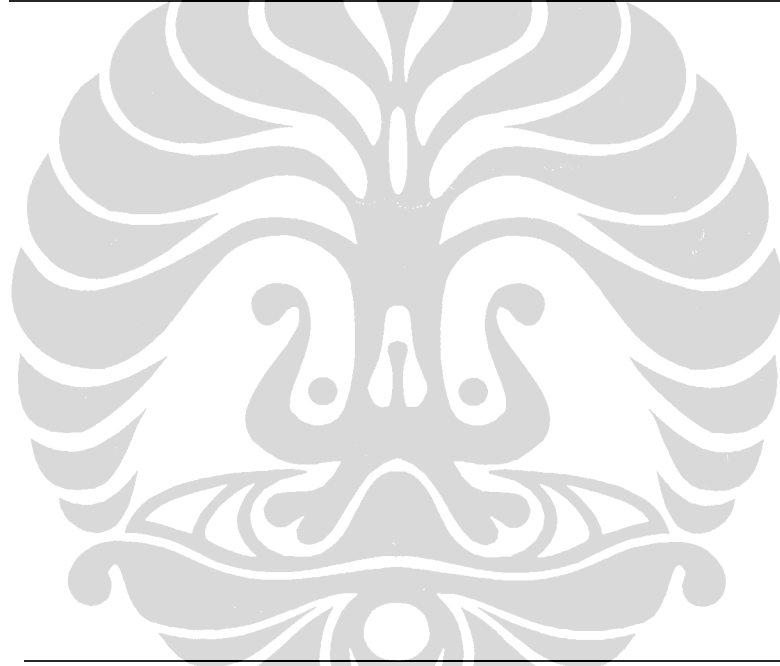
---

<sup>21</sup> Lihat Foucault (1982). *The Subject and Power* dalam *Foucault Effect*. Hlm 138-141.

<sup>22</sup> Dalam pandangan Scott Lash, model kekuasaan *governmentality* itu merupakan bentuk dari operasi kekuasaan yang tidak lagi dijalankan secara hegemonik, seperti dalam perspektif Gramscian atau *cultural studies*. Menurutnya, hegemoni merupakan bentuk dominasi yang dijalankan melalui konsensus seperti halnya melalui cara koersif. Ia disebut juga sebagai dominasi yang dijalankan dengan memanipulasi ideologi atau wacana. Hegemoni adalah kekuasaan simbolik seperti konsep yang dikembangkan oleh Bourdieu. Demikian pula, kekuasaan dalam bentuk disiplin perspektif Foucauldian juga dimengerti sebagai kekuasaan yang hegemonik. Pada *disciplinary power* selalu ada wacana yang berdiri di belakang institusi disiplin yang mendukung beroperasinya kekuasaan dalam model ini. Institusi ini kemudian menjalankan kekuasaan yang mikro yang meresapi setiap relasi sosial. Yang mendasari semua itu sehingga bisa dijalankan

Secara sederhana perbedaan antara relasi dominasi dan relasi kekuasaan dapat kita lihat pada tabel berikut.

	Model Relasi Kekuasaan	
	Relasi Dominasi	Relasi Kekuasaan ( <i>governmentality</i> )
Model relasi	Unequal relation of power	Equal relation of power
Aktor	State-society, powerfull-powerless, dominan-marginal	Between subject, between individuals
Aparatus	Dominasi and hegemony (disciplinary power and symbolic violence)	Governmentality
Teknologi	Violence and ideological manipulation, consent	Conduct of conduct
Basis relasi	Domination vanish freedom	Freedom is basis of power relation



adalah adanya wacana kebudayaan (*cultural discourse*) atau politisasi kebudayaan dan kekuasaan yang sah (*legitimate*). Dengan demikian, hegemoni mengandaikan dominasi simbolik, legitimasi kekuasaan, dan institusi kekuasaan, yakni yang terdapat pada ranah relasi ekonomi, sosial, dan politik (Lash, 2007). Namun kini, menurut Lash, model kekuasaan hegemonik itu telah bergeser menjadi posthegemonik.

Kekuasaan model hegemonik dijalankan secara meluas, sebaliknya kekuasaan yang posthegemonik dijalankan secara intensif. Pergeseran beroperasinya kekuasaan dari yang hegemonik menjadi posthegemonik adalah pergeseran antara rezim kekuasaan yang epistemologis menjadi model kekuasaan yang ontologis, dari model kekuasaan hegemonik sebagai kekuasaan terhadap (*power over*) menjadi model kekuasaan yang intensif sebagai kekuasaan dari dalam (*power from within*), dan dari model kekuasaan dan politik dalam terminologi normatif menjadi kekuasaan yang dimengerti sebagai faktisitas atau kenyataan (Lash, 2007). Konsep *Governmentality* adalah cara bagaimana Foucault menjelaskan model kekuasaan yang menurut Lash sebagai posthegemonik.

<sup>23</sup> Lihat op.cit. hlm. 141-142.

## 1.6. Metodologi

### 1.6.1. Rancangan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan dan sebagai implikasi dari kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam menjawab persoalan dan pertanyaan yang diajukan dalam rancangan penelitian ini.

Pertanyaan pokok penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki teknologi kekuasaan yang dijalankan aktor-aktor dan bagaimana model relasi kekuasaan pada konteks kasus penelitian. Ada beberapa prinsip metodologi yang digunakan Foucault untuk menyelidiki model relasi kekuasaan. (1) Mengajukan pertanyaan ‘bagaimana’ pada persoalan kekuasaan dari pada ‘mengapa’ atau ‘apa’ adalah upaya untuk melakukan penyelidikan kritis atas tema kekuasaan, bukan mencari dasar ontologis atau metafisiknya.<sup>24</sup> (2) Menganalisa kekuasaan bukan pada rasionalitas internalnya, tetapi pada strategi antagonismenya. Untuk memahami apa yang disebut dengan normalitas maka yang mesti diselidiki adalah apa yang dipandang sebagai tidak normal. Untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan, maka yang mesti diselidiki adalah pada bentuk-bentuk resistensi.<sup>25</sup> (3) Oleh karena basis relasi kekuasaan adalah adanya kebebasan, maka untuk menyelidiki relasi kekuasaan terletak pada basis adanya kebebasan, strategi, dan governmentality, bukan pada institusi politik. Jika menganalisa kekuasaan pada institusi politik maka yang didapat adalah subjek sebagai subjek hukum, yakni sebagai subjek yang memiliki dan tidak memiliki hak.<sup>26</sup> (4) Menyelidiki relasi kekuasaan adalah mengkombinasikan metode penyelidikan genealogi negara dan genealogi subjek karena analisa relasi kekuasaan tidak hanya pada makro politik tetapi juga pada *micro power*.<sup>27</sup>

Bertolak dari prinsip metodologis dan konsep Foucault tentang kekuasaan, maka objek penyelidikan relasi kekuasaan dalam analisa genealogi kekuasaan adalah pada praktik sosial subjek, yang dimengerti sebagai tindakan atau cara

---

<sup>24</sup> Foucault. *The Subject and Power*. Hlm 134-135

<sup>25</sup> Lihat Foucault, *The Subject and Power*. 129; *Society must be Defended*. Hlm. 294.

<sup>26</sup> Foucault. *The Ethics of The Concern of The Self*. Hlm 41

<sup>27</sup> Lihat Foucault. *Governmentality*.

seseorang bertindak.<sup>28</sup> Pada kasus penelitian ini, maka yang akan diselidiki adalah praktik sosial subjek korban lumpur lapindo, aktivis NGO dan non-NGO, dan akademisi sebagai subjek yang menjadi kendaraan bagi kekuasaan dan objek pengetahuan. Dari praktik sosial subjek dapat diketahui model relasi kekuasaannya apakah sebagai dominasi atau *governmentality* dengan merujuk pada tabel konsep kekuasaan. Penyelidikan ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan terlibat, serta studi dokumen terutama dari media massa dan literatur lainnya. Peneliti juga *live in* di lokasi pengungsian untuk memperoleh gambaran praktik sosial subjek sebagai pintu masuk dan titik tolak refleksi teoritis. Praktik kekuasaan negara<sup>29</sup> dan LBI yang berkaitan dengan lahirnya berbagai kebijakan politik-ekonomi maupun produk hukum yang dihasilkan dalam menangani kasus Lapindo adalah untuk mengetahui rasionalisasi terbentuknya praktik sosial tertentu.

---

<sup>28</sup> Metode ini berbeda dengan yang umum digunakan dalam analisa kekuasaan Foucauldian menggunakan analisa wacana karena penyelidikan ini merupakan implikasi dari analisa genealogi kekuasaan daripada arkeologi pengetahuan. Arkeologi digunakan dalam studi sejarah untuk menangkap apa yang disebut oleh Foucault sebagai *episteme*, bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu jaman tertentu. Ia dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada suatu zaman. Dalam studinya tentang kegilaan, misalnya, Foucault berusaha menangkap disposisi pengetahuan atas pemaknaannya terhadap normalitas sebagai lawan dari abnormalitas atau kegilaan.

Karya-karya Foucault selanjutnya menunjukkan minat secara lebih besar pada persoalan kekuasaan, bukan sekedar pembentukan sebuah pengetahuan dan kebenaran sebagai *episteme*. Dalam hal ini Foucault juga memperluas cakupan penelitiannya bagaimana rekonfigurasi pengetahuan dalam dunia modern, tidak hanya menunjukkan bagaimana struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu, melainkan bahwa dalam dunia modern relasi antara kekuasaan dan pengetahuan itu berimplikasi terhadap dan dalam tubuh individu dalam kaitannya dengan suatu bentuk kontrol sosial.

Pergeseran minat analisa Foucault dari yang semula perhatian penyelidikannya pada bentuk formasi wacana menjadi penyelidikan terhadap teknologi kekuasaan, berimplikasi pada penggunaan metode, dari arkeologi ide (pengetahuan) ke genealogi kekuasaan. Karya awal Foucault yang menggunakan genealogi dalam penyelidikannya adalah *Discipline and Punish*. Pada karya itu, Foucault tidak lagi berbicara mengenai wacana, dan relasi diskursif sebagai prioritas kajiannya, sebaliknya yang menjadi perhatian utama Foucault adalah pada aspek relasi dan praktik-praktik yang bersifat non-diskursif, yakni pada institusi sosial dan praktik sosial. Bila perhatian utama penyelidikan arkeologi adalah pada ide, pengetahuan, dan aspek kesadaran manusia, maka pada penyelidikan genealogi yang menjadi perhatian adalah tubuh individu di mana efek teknologi kekuasaan dapat diketahui darinya. Lihat Foucault dalam *Power/Knowledge*, *The Essential Foucault*, dan Smart dalam *Michel Foucault*.

<sup>29</sup> Pada kasus penelitian ini, negara meliputi pemerintah daerah (bupati) hingga pemerintah pusat (presiden), terutama dari kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan dalam penanganan kasus lapindo.

## 1.6.2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk kepentingan analisa penelitian yang mengacu pada kerangka konseptual dalam menjawab pertanyaan penelitian, ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Pertama, pandangan aktor-aktor dalam melihat fenomena semburan lumpur adalah untuk melihat bagaimana aktor-aktor itu mengkonstruksi pemaknaan atas fenomena semburan. Data ini penting untuk dapat menjawab pertanyaan pertama mengenai bagaimana pertarungan aktor-aktor dalam mengkonstruksi pemaknaan tentang semburan dan dalam memperebutkan klaim kebenaran. Kedua, praktik sosial aktor dalam ranah interaksi antaraktor adalah untuk melihat bagaimana aktor-aktor menjalankan kekuasaan. Data ini penting untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai bagaimana aktor-aktor dominan mengkonstruksi tata lingkungan dan sosial yang merefleksikan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam mengontrol aktor yang lain sebagai *governable subject*. Kedua jenis data ini penting untuk menjawab pertanyaan pokok penelitian ini tentang bagaimana model relasi kekuasaan dan bagaimana teknologi kekuasaan yang dijalankan dalam konteks kasus penelitian.

Sementara itu, untuk kepentingan penulisan tesis, ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yakni data yang digunakan untuk memperoleh gambaran besar tentang posisi kasus dari berbagai perspektif informan, dan data spesifik dan detail yang digunakan sebagai pintu masuk dalam melakukan refleksi teoritis melalui metode mini-etnografi<sup>30</sup>, khususnya digunakan untuk menganalisa model relasi kekuasaan.

Informan korban lumpur, aktivis NGO dan non-NGO, dan akademisi dipilih dengan metode intensional dan *snowball*. Untuk informan korban lumpur dipilih berdasarkan kategori antara yang menerima dan menolak skema ganti rugi Perpres 14 tahun 2007, kelompok yang menerima skema relokasi versi Minarak Lapindo Jaya (MLJ) dan yang menolak, kelompok yang masuk dalam peta terdampak dan di luar peta terdampak, dan kelompok-kelompok paguyuban yang dibentuk oleh warga. Informan dari masing-masing kelompok ini adalah ketua atau pengurus

---

<sup>30</sup> Disain ini dipakai menyesuaikan waktu penelitian yang singkat sementara gambaran dan analisa temuan lebih memungkinkan dapat dilakukan menggunakan disain etnografi. Lihat Rossman and Rallis. 2003. *Learning in the Field*. Sage Publication. London. Hlm. 128-129



paguyuban. Dari kategori informan korban itu, peneliti telah melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dari kelompok Pagar Rekontrak (4 informan), kelompok Geppres (3 informan), kelompok GKLL (2 informan wawancara mendalam dan 6 informan FGD), kelompok 9D (2 informan), kelompok 3D (3 informan), kelompok Perwakilan Warga Perumtas 1 (2 informan).

Data dan informasi yang dikumpulkan dari informan-informan itu adalah perspektif masing-masing kelompok dalam menyikapi kasus Lapindo dan bagaimana mereka memandang fenomena lumpur, dan untuk memperoleh gambaran besar bagaimana kasus ini terjadi dalam perspektif korban. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara mendalam. Penelitian etnografi difokuskan pada kelompok pengungsi Pasar Baru Porong dengan informan kunci pada ketua paguyuban dan informan lainnya yang berhubungan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman, pemikiran, dan perasaan sebagai korban yang berada di pengungsian. Data dan informasi yang diperoleh dari model etnografi ini akan menjadi pintu masuk dalam melakukan refleksi teoritis. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat.

Informan dari kalangan aktivis NGO dan non-NGO dipilih berdasarkan kategori yang melakukan advokasi dan pendampingan korban yang *live in* di pengungsian atau yang membentuk Posko Bersama. Dari kategori ini, saya telah melakukan wawancara mendalam dengan dua orang aktivis, yakni Winarko dan Imam. Data hasil wawancara mendalam informan LSM ini dikumpulkan untuk memperoleh gambaran kasus dari perspektif LSM, bagaimana mereka mengkonstruksi pemaknaan tentang fenomena semburan, serta bagaimana mereka melakukan pendampingan terhadap korban. Untuk memperoleh data etnografi atas bagaimana pendampingan aktivis terhadap korban, saya tinggal di Posko Bersama dan terlibat dalam beberapa rapat aktivis dan rapat aksi aktivis dengan korban. Pengamatan yang saya lakukan melalui keterlibatan pada beberapa proses aktivitas Posko Bersama bertujuan untuk dapat memahami pengalaman, pemikiran, dan perasaan aktivis dalam melakukan advokasi. Data ini penting sebagai pintu masuk melakukan refleksi teoritis mengenai bagaimana model relasi

kekuasaan dan bagaimana teknologi kekuasaan yang dijalankan dalam konteks kasus Lapindo.

Informan dari kalangan akademisi dipilih berdasarkan kategori antara yang berpendapat bencana lingkungan semburan lumpur lapindo sebagai bencana alam dan yang memandangnya sebagai kesalahan pengeboran. Pemilihan informan kalangan akademisi menggunakan teknik *snowball*. Informan yang telah saya wawancarai dalam kategori ini adalah Soffian Hadi, Amin Widodo, dan Suparto Wijoyo. Data dan informasi dari informan ini dikumpulkan untuk memperoleh gambaran kasus terutama perdebatan wacana tentang sebab semburan dari kalangan akademisi. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara mendalam dan dari sumber sekunder media massa yang mengutip pendapat dan pandangan akademisi mengenai kasus Lapindo.

Informan dalam kelompok pemerintah dipilih berdasarkan kategori dinas-dinas Pemda Sidoarjo yang paling berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi korban. Dinas-dinas yang telah saya wawancarai berdasarkan kategori di atas adalah Bappekab Sidoarjo, BPN, Dinas Sosial, Dinas Pencatatan Sipil, dan BPLS. Untuk melengkapi data dan informasi dari kelompok pemerintah, saya juga menggali sumber-sumber sekunder meliputi: produk hukum negara baik yang berkaitan dengan kasus Lapindo maupun produk hukum pertambangan, pernyataan-pernyataan dan kebijakan pemerintah terkait dengan kasus Lapindo diperoleh dari media massa. Sedangkan data dan informasi mengenai bagaimana pandangan dan sikap LBI sebagai korporasi yang terlibat dalam kasus ini tidak dilakukan melalui wawancara mendalam karena penolakan surat ijin wawancara sehingga diperoleh dengan mengkaji isi media-media yang dibuat oleh LBI terkait penyelesaian kasus ini dan pandangan-pandangan pejabat korporasi dalam media massa.

### **1.6.3. Proses Pengumpulan Data Lapangan**

Tesis ini tentang *governemntality* yang dipraktikan para aktivis NGO dan non-NGO sebagai cara bagaimana kekuasaan dijalankan dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo. Dalam banyak studi tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, negara merupakan aktor dominan dalam *governmmetality*. Jika

dikembalikan pada Foucault, konsep ini berasal dari analisa genealogi negara, yakni bagaimana kekuasaan dijalankan oleh negara dalam mengontrol populasi dan teritorinya. Kasus Lapindo memberikan gambaran yang berbeda tentang aktor *governmentality*, bukan negara, melainkan aktivis yang lebih berkepentingan mengintervensi relasi sosial penduduk lokal. Negara tidak memiliki peran dominan dan tidak berkepentingan melakukan penguasaan baik terhadap penduduk maupun teritori yang menjadi medan pertarungan kekuasaan. Sebagian besar informan dalam penelitian ini berkomentar bahwa tidak ada negara dalam kasus ini, konflik ini murni antara korporasi dan masyarakat.

Tesis ini pada awalnya disusun untuk mengetahui bagaimana kekuasaan dijalankan oleh negara dalam konteks kasus Lapindo. Di tengah-tengah melakukan penelitian, saya bertanya-tanya tentang apa pentingnya mengetahui teknologi kekuasaan yang dijalankan oleh negara. Signifikansi praktis bagi penyelesaian kasus ini menghantui pikiran saya selama berada di lapangan. Proposal yang saya susun sebagai titik pijak penelitian ini menjadi sangat teoritis ketika saya berada di lapangan berhadapan langsung dengan kasus. Kasus ini tidak seperti yang saya persepsikan sebelumnya ketika sedang menyusun proposal. Beberapa temuan lapangan membuat saya lebih memfokuskan penelitian pada persoalan yang lebih memiliki signifikansi dalam penyelesaian kasus, meski juga dengan dibimbing teori yang menjadi inspirasi saya dalam melihat persoalan. Studi tentang perdebatan para ilmuwan dalam memandang kasus Lapindo pada awalnya tidak menjadi perhatian pokok dalam penelitian saya. Perjumpaan dan pergumulan dengan orang-orang GKLL, diskusi dengan pegawai Dinsos Sidoarjo yang berada di lapangan, serta diskusi dengan beberapa pihak di BPLS, terutama geolognya, membuka pikiran saya dalam melihat kasus ini dari perspektif yang berbeda.

Selama masa penyusunan proposal, saya lebih banyak bergaul dengan teman-teman aktivis dan korban di pengungsian pasar. Sedikit pemahaman tentang situs kasus di pengungsian pasar membuat saya berusaha melihat lebih jauh bagaimana bentuk resistensi korban di pengungsian yang menggambarkan teknologi kekuasaan apa yang digunakan oleh aktor dominan dalam mengontrol

korban dan dalam mendisain penyelesaian kasus ini. Peran aktivis merupakan bentuk dari apa yang disebut Foucault sebagai pemberdayaan. Saat kembali ke lapangan melakukan penelitian, telah terjadi perubahan relasi aktivis dan pengungsi pasar, terutama pengurus paguyuban. Mereka tidak lagi berkolaborasi menuntut hak warga tetapi memisahkan diri bahkan saling mencaci. Hal ini menandakan bahwa yang dilakukan aktivis tidak sekedar upaya melakukan pemberdayaan, tetapi oleh warga dipahami sebagai bentuk intervensi dalam merespon kasus. Temuan ini yang membuat saya melihat aktor *governmentality* pada aktivis.

Selama dua bulan di lapangan, saya melakukan wawancara dengan beberapa aktivis dan tinggal di posko mereka untuk mengamati dan memahami bagaimana mereka melakukan advokasi terhadap korban. Saya membuat catatan tentang rapat-rapat internal aktivis dan pertemuan-pertemuan mereka dengan korban dalam rangka konsolidasi ketika hendak melakukan aksi demonstrasi. Saya juga mempelajari media yang dipublikasi oleh para aktivis dalam usaha mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman publik, terutama korban, terhadap masalah dan bentuk penyelesaian kasus ini.

Wawancara juga saya lakukan dengan beberapa korban dari berbagai kelompok yang berbeda-beda berdasarkan bentuk tuntutan mereka. Saya juga mengamati kehidupan sehari-hari korban terutama yang berada di posko aktivis, dan korban yang tinggal di pengungsi pasar. Para pegawai pemda yang berada di instansi yang berkaitan dengan penyelesaian kasus ini, Dinsos, BPN, dan Bappekab, menjadi informan untuk mengetahui apa kepentingan pemerintah kabupaten Sidoarjo terhadap penyelesaian kasus ini. Pernyataan-pernyataan pemerintah Sidoarjo dan pemerintah pusat di media massa juga menjadi perhatian dalam studi saya. Badan khusus yang dibentuk pemerintah pusat dalam penyelesaian kasus ini, BPLS, terutama geolog yang melambari keseluruhan kerja badan ini dan bagian penanganan di lapangan juga menjadi informan untuk memahami kepentingan dan rasionalisasi pemerintah pusat atas bentuk penyelesaian kasus yang mereka jalankan.

Sikap defensif pihak korporasi dari tuduhan publik membuat beberapa kali surat yang saya ajukan tidak memperoleh respon yang mendukung keinginan saya melakukan wawancara. Sebagai alternatifnya, saya mencermati pernyataan-pernyataan Lapindo dan Minarak yang dipublikasi oleh media massa dan mempelajari media yang mereka publikasi baik situs maupun majalah.

#### **1.6.4. Teknik analisa data**

Data yang diperoleh dari penelitian yang bertolak dari kedua pertanyaan penelitian di atas akan diklasifikasikan berdasarkan kategori menjadi informasi yang akan menjadi dasar analisa konseptual/teoritis dengan metode refleksi.<sup>31</sup> Merujuk pada Geertz, penelitian yang dilakukan dengan studi kasus semburan lumpur lapindo bertujuan untuk menghasilkan refleksi teoritis, sebagaimana disebut dalam tujuan penelitian ini, bukan semata-mata berbicara mengenai kasus. Kasus yang diangkat akan menjadi pintu masuk dalam melakukan analisa konseptual atau teoritis yang bertolak dari persoalan konseptual/teoritis penelitian ini. *The locus of study is not the object of study. Anthropologists don't study village; they study in village* (Geertz, 1973, 22).

Data primer dari wawancara mendalam dan pengamatan serta data sekunder baik dari literatur maupun media massa sesuai dengan kategori data seperti dipaparkan di atas dianalisa secara deskriptif untuk memberikan gambaran besar kasus lapindo dan secara analitis melalui metode refleksi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan mengacu pada kerangka konseptual yang digunakan serta konsep dan teori lainnya yang relevan.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Tesis ini disusun dalam enam bab. Bab pertama merupakan narasi yang menceritakan dan menjelaskan keseluruhan isi tesis terutama untuk menunjukkan apa yang menjadi latar belakang masalah dari penyusunan tesis ini. Di samping itu, pada bab ini juga dibahas teori dan konsep apa yang menjadi pijakan dalam menganalisa kasus dan permasalahan yang diajukan, serta menceritakan proses

---

<sup>31</sup> Lihat Lisa Adkins. 2002. *Reflexivity and the Politics of Qualitative Research*. Sage Publication. London. Hlm. 332-333.

bagaimana pengumpulan data dilakukan. Bab kedua merupakan gambaran umum kasus dan situs penelitian. Bab ketiga mengeksplorasi pertarungan wacana aktor-aktor dalam melihat kasus Lapindo dan gambaran serta analisa bagaimana proses mengendapnya wacana (asumsi) diyakini sebagai kebenaran. Bab keempat merupakan gambaran mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan oleh korban dalam merespon intervensi aktivis, Lapindo, dan pemerintah dalam mengkonstruksi penyelesaian kasus ini. Bagian ini juga memerikan gambaran dan analisa bentuk-bentuk praktik sosial korban, bagaimana bentuk resistensi, kolaborasi, negosiasi, dan kompromi korban. Bab kelima berisi deskripsi mengenai bagaimana problematisasi dilakukan oleh para aktivis dan Lapindo terhadap korban, serta memuat analisa mengenai implikasi dari problematisasi itu dalam pembentukan praktik sosial korban. Terakhir adalah bab keenam, merupakan kesimpulan yang berisi refleksi atas keseluruhan analisa dalam tesis ini serta pembacaan kritis terhadap teori yang menjadi landasan dalam melakukan analisa. Bagian ini juga memuat implikasi praktis penulisan tesis ini terhadap penyelesaian kasus Lapindo.